



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENANGANAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP
BEREMPUAN OLEH UPT PPA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN
PERWAKO PEKANBARU NOMOR 142 TAHUN 2019
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH

**MANISHA DWI PUTRI
NIM 11724202856**

**HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1442 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“PENANGANAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN OLEH UPT PPA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERWAKO PEKANBARU NOMOR 142 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**, yang ditulis oleh :

Nama : Manisha Dwi Putri
 NIM : 11724202856
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 7 Ramadan 1442 H
 19 April 2021 M

Pembimbing Skripsi

Irfan Zulfikar, M.Ag
 NIP: 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Universitas Islam Sultan Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENANGANAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN OLEH UPT PPA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERWAKO PEKANBARU NOMOR 142 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : **MANISHA DWI PUTRI**
NIM : 11724202856
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 08 Juni 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ujian Secara Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I

Dr. Amrul Muzan, MA

Penguji II

Bambang Hermanto, M.AG

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.

NIP. 19580712 1986031 005



ABSTRAK

Manisha Dwi Putri (2020) : Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Oleh UPT PPA Kota Pekanbaru Berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Penelitian ini di latarbelakangi adanya kenaikan jumlah kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan pada tahun 2019-2020. Sehingga perlunya perhatian khusus dari pemerintah untuk menangani masalah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan ini. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni bagaimana penanganan, apa faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru, dan bagaimana tinjauannya dalam fiqh siyasah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian sosiologis hukum dengan metode Penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara sebagai data primer yang dihimpun dari pihak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru. Data skunder yang didapat dari buku-buku, dokumentasi sedangkan data tersier di dapat dari kamus, ensiklopedia, artikel pada majalah atau surat kabar dan sebagainya yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan deskriptif kualitatif.

Melalui observasi dan wawancara dilapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash al-Qur'an, dan kaedah fiqiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.

Dari uraian yang disajikan dan dari tinjauan yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait penanganan, faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh UPT PPA Kota Pekanbaru berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019 masih belum maksimal karena adanya faktor pengambat penanganan. Dengan demikian hasil dari penelitian penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh UPT PPA Kota Pekanbaru belum sepenuhnya sejalan dengan tinjauan Fiqh Siyasah dikarenakan pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perlindungan rakyatnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Ashabul Yamin), Ibunda (Nurmayati) dan Kakak Laki-laki (Dodi Suganda) dan Adik Perempuan (Tiara Nur Annisa) yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan doa merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat di awal semester delapan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin M.Ag Rektor UIN Suska, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak Irfan Zulfikar sebagai pembimbing skripsi penulis sekaligus Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini. Beliau sudah seperti ayahanda bagi penulis karena kebaikan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
 7. Kepada Ibu Dra. Ria Dina Srikadarani selaku Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru yang telah banyak memberi arahan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
 8. Kepada Staf UPT PPA Kota Pekanbaru yang telah banyak memberi arahan dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
 9. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas C angkatan 2017 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
 10. Kepada Lusiana Putri, Raudahtul Jannah, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 11. Kepada Suhendri yang telah banyak membantu dan tak henti hentinya memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

12. Kepada Gita Melinia Herianti, Niken Nabilla, Jean Tama Akmadani dan Lia Septiana Oryza yang telah membantu dan memberi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu‘alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 12 April 2021
Penulis

MANISHA DWI PUTRI
NIM 11724202856

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Kegunaan Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru	22
B. Dasar Hukum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru	24
C. Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru	25
D. Bentuk-Bentuk Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru	28
E. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru	30
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Penanganan	31
B. Kekerasan Berbasis Gender	32
C. Peraturan Wali Kota	55
D. Konsep Fiqih Siyasah.....	59

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Fiqih Siyasah.....	64
F. Tinjauan Tentang Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru	69

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Data Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Di Kota Pekanbaru	72
B. Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Oleh UPT Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru Berdasarkan Perwako Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019	73
C. Faktor-Faktor Penghambat Dan Pendukung Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Oleh UPT PPA Kota Pekanbaru.....	82
D. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Oleh UPT PPA Kota Pekanbaru	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fakta-fakta sejarah mengungkapkan, beribu tahun sebelum Islam datang, khususnya di zaman jahiliah, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh dan oleh karenanya perempuan tidak berhak bersuara, tidak berhak berkarya, dan tidak berhak memiliki harta.¹

Cerita tentang penguburan anak-anak perempuan secara hidup-hidup karena orangtuanya khawatir menanggung malu adalah lembaran hitam yang menghiasi zaman jahiliah. Ringkasnya, budaya jahiliah merendahkan perempuan dan memandangnya sebagai makhluk hina. Budaya itulah yang sekarang dikenal dengan budaya patriaki. Budaya yang menolerir adanya penindasan, perlakuan tidak adil, dan tidak manusiawi.²

Akibat budaya jahiliah ini, tidak sedikit kaum perempuan yang dipingit, diasung, dan dibelenggu. Mereka tidak diizinkan menuntut ilmu, menikmati pendidikan tinggi, berkarier, bekerja, dan memiliki profesi, melakukan aktivitas kemanusiaan yang bermanfaat serta menggali pengetahuan untuk menolong sesama.³

Perempuan hanya dipaksa melakukan tugas-tugas reproduksi, melahirkan anak, mengasuh, dan mengurus keluarga, serta dianggap sebagai penanggung jawab urusan domestik di rumah tangga. Fatalnya, mesti meski telah mengerjakan

¹Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta:Elex Media Komputindo,2014), h. 11

²*Ibid.*

³*Ibid.*

semua urusan mahapenting tadi, tetap saja mereka dihinakan, dilarang bersuara dan mengemukakan pandangan kritis.⁴

Di keluarga mereka bukan pengambil keputusan penting, di masyarakat pun jarang diperhitungkan pendapatnya dan sangat jarang diajak dalam musyawarah memutuskan kebijakan publik. Tidak heran, jika posisi perempuan hanyalah sebatas penjaga dapur, sumur, kasur, serta dianggap *konco wingking* (teman di arena belakang).⁵

Terlihat jelas di masyarakat, semua bangsa-bangsa dan masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai makhluk domestik akan menjadi bangsa dan masyarakat yang tinggal dan terkebelakang. Tentu saja terkebelakang karena mereka tidak memberikan akses bagi perempuan untuk berkiprah dalam semua bidang pembangunan, seperti dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, hukum, Sosial, politik, dan ekonomi.⁶

Kemudian Islam datang dengan keadilan dan persamaan antara lelaki dan perempuan serta menghormati harkat dan martabatnya. Islam merupakan agama yang membawa misi luhur, yaitu *Rahmatan lil'alam* (pembawa kebahagiaan bagi sekalian alam), sekaligus sebagai agama tauhid yang menyadari bahwa yang patut disembah adalah Allah SWT, selain Dia semua hanyalah makhluk belaka. Islam mengajarkan bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah SWT. dan sama kedudukannya di hadapan Allah SWT. Allah tidak membedakan hamba-Nya berdasarkan jenis kelamin, satu-satunya perbedaan yang memungkinkan seseorang

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

menjadi lebih tinggi atau lebih rendah derajatnya dari pada manusia lainnya adalah nilai ketaqwaannya kepada Allah SWT.

Sebagaimana firman Allah SWT di dalam Al-Quran surah al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

Artinya : *"Wahai manusia! Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti."*⁷ (Q.S. Al-Hujurat : 13)

Dalam kitab tafsir Jalalain berikut tafsir surah al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ (Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan) yakni dari Adam dan Hawa -- وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا (dan Kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa) lafaz syu'ban adalah bentuk jamak dari lafaz sya'bun. Yang artinya tingkatan nasab keturunan yang paling tinggi -- وَقَبَائِلَ (dan bersuku- suku) kedudukan suku berada di bawah bangsa, setelah suku atau kabilah di sebut Imrah, lalu Batn, Hasyim adalah nama suatu Fakhz, dan Al- Abbas adalah nama suatu fasilah -- لِتَعَارَفُوا (supaya kalian saling mengenal) lafaz ta'arafu asalnya adalah tata'arafu, kemudian salah satu dari kedua huruf ta dibuang sehingga jadilah ta'arafu; maksudnya supaya sebagian dari kalian saling mengenal sebagian

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Sygma Examedia Ar-Ranleema, 2009). h. 517

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 UIN SUSKA RIAU
 of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lain, bukan untuk saling membanggakan ketinggian nasab atau keturunan, karena sesungguhnya kebanggaan itu hanya dinilai dari segi ketakwaan . -- إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ (Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Seungguhnya Allah Maha Mengetahui) tentang kalian -- خَيْرٌ (lagi Maha Mengenal) apa yang tersimpan di dalam batin kalian.⁸

Ayat tersebut memberikan gambaran kepada kita tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah (dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mengikis tuntas pandangan yang menyatakan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang memarginalkan salah satu diantara keduanya. Persamaan tersebut meliputi berbagai hal misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah SWT., ayat ini juga mempertegas misi pokok Al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis dan ikatan ikatan primordial lainnya. Namun demikian sekalipun secara teoritis Al-Qur'an mengandung prinsip kesetaraan antara laki laki dan perempuan, namun ternyata dalam tatanan implementasi seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.

Rasulullah Saw. sangat gigih mengikis budaya jahiliyah yang tidak manusiawi dan melecehkan perempuan. Beliau memperjuangkan terwujudnya

⁸Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Syuti, *Terjrmahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 2*, (Bandung: Sinar Baru AL-Gensindo, 2016). h 895

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ajaran Islam yang akomodatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, ajaran yang mengusung kesetaraan dan keadilan gender. Beliau secara bertahap mengembalikan lagi hak hak dasar perempuan sebagai manusia utuh dan merdeka.⁹

Sejarah Islam mencatat bahwa dalam waktu yang relatif singkat, perjuangan Rasulullah membuahkan hasil yang signifikan. Kaum perempuan lalu berhak menyuarakan opini dan keyakinan, dan berhak mengaktualisasikan karya, dan berhak memiliki harta yang memungkinkan mereka diakui sebagai warga negara penuh. Bahkan, tidak sedikit perempuan diutus menjadi pemimpin dilingkungan sukunya.¹⁰

Dapat disimpulkan, Islam menentang budaya jahiliyah yang merendahkan perempuan. Selanjutnya, secara radikal Islam memperkenalkan kepada masyarakat Arab dan juga masyarakat dunia tentang pentingnya memanusiakan perempuan dan mengangkat harkat dan martabat mereka sebagai manusia merdeka yang posisinya setara laki-laki, baik dalam keluarga maupun kehidupan luas di masyarakat.¹¹

Tentu saja ada fungsi-fungsi yang berbeda diantara perempuan dan laki-laki akibat perbedaan fisik-biologis, namun suatu perbedaan tersebut tidak harus menjadikan salah satu pihak, terutama perempuan mengalami ketimpangan dan ketidakadilan gender berupa diskriminasi akibat pandangan stereotip, subordinasi, marginalisasi, kekerasan, dan beban yang berat dalam kehidupan sehari-hari.¹²

⁹Musdah Mulia, *op. cit.*, h. 13

¹⁰*Ibid.*

¹¹*Ibid.*

¹²*Ibid.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks keindonesiaan yang masyarakatnya sejak dulu melestarikan nilai-nilai budaya patriaki, maka interpretasi ajaran Islam yang bias gender lalu mendapat tempat yang subur. Relasi gender adalah hasil konstruksi budaya, maka untuk mengubah relasi gender yang timpang dan tidak adil terhadap perempuan dibutuhkan upaya rekonstruksi budaya. Adalah sebuah kebutuhan untuk melakukan rekonstruksi budaya, mengubah budaya patriaki menjadi budaya egalitarian; mengubah budaya feodalistik menjadi budaya humanistic. Islam mengajarkan prinsip penghargaan dan penghormatan kepada semua manusia tanpa melihat jenis kelamin biologis, maupun sosialnya (gender), juga tanpa melihat ikatan-ikatan primordial lain yang melekat pada manusia.¹³

Sejarah gerakan perempuan Indonesia membuktikan bahwa upaya-upaya konkret rekonstruksi budaya di negeri ini sudah berlangsung lama, antara lain telah dilakukan oleh tokoh-tokoh perempuan, seperti Kartini, Rasuna Said, Cut Nyak Dhien. Akan tetapi, harus diakui, perjuangan mereka belum selesai. Karena itu, menjadi tugas perempuan generasi sekarang melanjutkan cita-cita luhur mereka.¹⁴

Islam memandang bahwa kekerasan terhadap perempuan, merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum atau syariat Islam. Hukum Islam yang sebagian besarnya bersumber dari wahyu Tuhan dan Sunnah Nabi, dilihat dari konteks praktik jahiliyyah, merupakan suatu revolusi, karena Al-Qur'an sebagai salah satu sumber hukum Islam sangat meningkatkan status sosial perempuan dan meletakkan norma-norma yang jelas, sebagai penentuan terhadap adat dan kebiasaan yang memperlakukan perempuan sebagai suatu yang diperdagangkan

¹³*Ibid.*, h. 14

¹⁴*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

atau sebagai objek nafsu seksual. Di samping itu, dalam Al-Qur'an juga menanamkan norma-norma yang pasti dan memberi perempuan status yang jelas, meskipun tidak secara persis setara dengan laki-laki.

Sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al-Qur'an secara tekstual tidak menetapkan negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, akan tetapi ide dasar tentang kehidupan bernegara dan pemerintahan diungkap oleh Al-Qur'an. Dari ide dasar itu fiqh siyasah dikembangkan menjadi bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara.¹⁵

Kekerasan merupakan bentuk dari ketidakseimbangan antara peran perempuan dan laki laki hingga menimbulkan dominasi dan diskriminasi yang akan menghambat kaum perempuan untuk maju.¹⁶ Salah satunya kekerasan berbasis gender yang kebanyakan korbannya adalah perempuan.

Perbedaan gender sesungguhnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidak adilan terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender dapat dilihat melalui berbagai manifestasi seperti marginalisasi, subordinasi, pembentukan stereotype, kekerasan maupun intimidasi. Semua manifestasi kekerasan tersebut adalah kekerasan yang berbasis gender yang pada umumnya terjadi di lingkungan keluarga dan pelakunya adalah orang yang dekat dengan si korban kekerasan.¹⁷

¹⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), h. 13.

¹⁶<https://www.Kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1669/waspada-bahaya-kekerasan-dalam-pacaran> 12 Februari 2021 12.51 wib.

¹⁷Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan berbasis gender (KBG) merupakan tindakan kekerasan yang ketika di telusuri lebih dalam ternyata memuat niatan atau maksud yang memcehkan korban berdasarkan asumsi gender dan seksual maka inilah yang dikatakan KBG. Kekerasan berbasis gender dapat terjadi di dunia nyata maupun online, diwilayah pribadi (dalam peretemanan, dan pacaran) maupun publik (misalnya kekerasan di tempat kerja atau di tempat umum).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru terbentuklah Dinas PP-PA Pekanbaru, untuk mencegah dan menangani tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Kemudian dengan di keluarkannya Peraturan Walikota Pekanbaru No. 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPTD PPA berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.¹⁸ Salah satunya yaitu penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:

1. Pengaduan masyarakat;
2. Penjangkauan korban;
3. Pengelolaan kasus;
4. Penampungan Sementara
5. Mediasi; dan
6. Pendampingan korban.¹⁹

Selain itu juga UPT PPA Kota Pekanbaru melaksanakan layanan:

1. Menjamin Kerahasiaan, segala bentuk kasus dan pelaporan yang dilaporkan di UPT PPA Kota Pekanbaru terjamin kerahasiaannya mulai dari kasus, identitas pelapor dan privasi korban.
2. Layanan Edukasi, UPT PPA Kota Pekanbaru menyediakan layanan informasi dan edukasi bagi masyarakat yang membutuhkan yaitu terkait tindak kekerasan terhadap perlindungan perempuan dan anak.
3. Penjangkauan , dalam memberikan pelayanan, UPT PPA Kota Pekanbaru juga melakukan penjangkauan bagi korban tindak kekerasan perempuan dan anak yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dan dalam kondisi

¹⁸Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 BAB II Pasal 4

¹⁹Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 BAB II Pasal 5

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

darurat. Petugas UPT PPA Kota Pekanbaru siap melayani dengan sepenuh hati.

4. Tidak Dipungut Biaya, semua layanan yang diberikan oleh UPT PPA Kota Pekanbaru tidak dipungut biaya bagi pelapor maupun korban tindak kekerasan perempuan dan anak.

Adapun layanan Petugas UPT PPA Kota Pekanbaru :

1. Konselor UPT PPA, Konselor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling dan penyuluhan. Konselor di UPT PPA Kota Pekanbaru memiliki dua bidang pertama konselor dibidang hukum dan konselor dibidang keluarga dan anak. Konselor di UPT PPA Kota Pekanbaru bertugas memberikan pendampingan kepada korban tindak kekerasan perempuan dan anak. UPT PPA Kota Pekanbaru memiliki 3 orang konselor
2. Psikolog UPT PPA, Psikolog adalah seorang ahli dalam ilmu psikologi yang berfokus pada psikis dari korban tindak kekerasan perempuan dan anak. Psikolog yang siap melayani masyarakat untuk memberikan pendampingan dari tindak kekerasan perempuan dan anak. UPT PPA Kota Pekanbaru memiliki 2 orang psikolog.
3. Petugas asesemen UPT PPA, petugas asesemen adalah tahap awal yang menerima setiap laporan pengaduan dari tindak kekerasan perempuan dan anak. Petugas asesmen bertugas menerima laporan dan menanggapi setiap layanan pengaduan baik yang datang secara langsung di UPT PPA Kota Pekanbaru maupun yang melalui layanan Hotline 24 JAM di nomer 0812-7799-3737. UPT PPA Kota Pekanbaru memiliki 3 orang Petugas asesemen

Adapun Kemitraan UPT PPA Kota Pekanbaru:

1. Kepolisian, UPT PPA Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Kepolisian yaitu UPT PPA Membantu korban untuk membuat laporan kasus di Kepolisian
2. Kejaksaan, UPT PPA Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Kejaksaan yaitu pihak UPT PPA ikut mendampingi korban yang kasusnya berlanjut pada jalur hukum, yaitu pada saat di pengadilan UPT PPA akan mengutus konselor untuk mendampingi korban.
3. OPD Terkait, UPT PPA Kota Pekanbaru bekerjasama dengan OPD seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan OPD lainnya sesuai dengan kebutuhan korban.
4. Lembaga Bantuan Hukum, UPT PPA Kota Pekanbaru bekerjasama dengan LBH apabila korban membutuhkan seorang advokat untuk mendampingi dan membela korban pada saat di pengadilan.
5. Balai Rehabilitasi Sosial Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus
6. Stakeholder, UPT PPA Kota Pekanbaru bekerjasama dengan Stakeholder seperti RT, RW, Banbinsa, Bhabinkamtibmas dan Stakeholder lainya untuk membantu dalam penanganan kasus.

Dari observasi yang penulis lakukan di UPT PPA Kota Pekanbaru Kasus kekerasan berbasis gender terus meningkat dari tahun ketahun terumata di Kota Pekanbaru. Ada 6 (enam) kasus pada tahun 2019, dan 7 (tujuh) kasus pada tahun 2020, bahkan pada bulan januari 2021 sudah masuk 1 (satu) kasus kekerasan berbasis gender di UPT PPA Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Alarif Kasim Riau

Kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang masuk ke UPT PPA Kota Pekanbaru tidak hanya tentang kekerasan fisik, pelecehan seksual, tetapi juga kekerasan berbasis gender secara online, yang dilakukan oleh pelaku yang mana pelaku tersebut merupakan pacar/ teman dekat/ mantan suami korban dengan cara menyebarkan foto atau video yang tidak senonoh tentang korban ke dunia maya/ sosial media sehingga korban menjadi malu dan tertekan. Dan sebagian besar korbannya berasal dari kalangan menengah kebawah.

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan, melihat gejala-gejala yang terdapat dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di UPT PPA Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Masih ada kekurangan dalam mediasi, yakni belum ada ruangan khusus untuk mediasi.
2. Masih ada kekurangan dalam pengelolaan kasus yaitu belum ada tenaga ahli IT dalam pengelolaan kasus kekerasan berbasis gender online untuk menghapus rekam jejak digital korban yang sudah tersebar.
3. Masih ada kekurangan yaitu tidak ada pengkhususan ruang konseling untuk perempuan.

Berdasarkan gejala-gejala diatas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian yang berjudul **"PENANGANAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN OLEH UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERWAKO PEKANBARU NO 142 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH."**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat menjadi lebih terarah, maka di perlukan batasan masalah yang akan di teliti nantinya. Penelitian ini di fokuskan kepada Penanganan dan faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru. Maka peneliti membatasi kepada Penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru pada tahun 2019 – 2020.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari batasan masalah di atas maka, penulis merumuskan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Penanganan Kasus Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi Penanganan Kasus Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru
3. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dari penelitian ini adalah :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Untuk mengetahui Penanganan Kasus Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis sebagai berikut :

1. Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan berarti bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di Fakultas Syariah dan Hukum terutama Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya terkait kekerasan fisik terhadap perempuan.
2. Bagi kegunaan praktis, sebagai salah satu sumber informasi bagi kita untuk mengetahui lebih tentang Penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.²⁰ artinya penelitian ini akan di bahas dalam paparan yang di uraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin berdasarkan pasal-pasal hukum yang digunakan.

2. Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis sosiologis, yaitu cara atau prosedur yang digunakan penulis secara langsung turun kelapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian sosiologis ini dilakukan dengan cara mengkaji hukum dalam realita di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru JL. Dagang No. 78 KP. Tengah Kec. Sukajadi Hotline Service 081277993737.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.

b. Objek

Adapun objek dalam penelitian ini adalah penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

²⁰Mathew B. Miles dan A. Michael Hubermen, *"Analisis Data Kualitatif"* Di terjemahkan: oleh Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), h. 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak di teliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya oleh peneliti untuk di pelajari dan di tarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan dan Staf Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru yang berjumlah 10 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian dalam menemukan penelitian. Teknik pengambilan sampel yang di gunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan memilih informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mengetahui masalah mendalam. Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru, 2 orang petugas Asesmen UPT PPA Kota Pekanbaru, 2 orang Konselor Hukum UPT PPA Kota Pekanbaru.

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.²¹ Adapun sumber primer dalam penelitian ini adalah berupa data hasil wawancara langsung peneliti dengan pihak Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat. Dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku-buku, sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder tidak perlu diolah lagi.²² Data sekunder dalam penelitian ini digunakan yaitu berupa dokumen rekap kasus, profil, dasar hukum UPT PPA Kota Pekanbaru dan lainnya.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan skunder. Adapun data tersier ini yaitu kamus, ensiklopedia, artikel pada majalah atau surat kabar dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

²¹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015). h. 89

²² *Ibid.* h. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpul data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²³

b. Wawancara

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung pada sasaran yang diteliti dan melakukan wawancara, wawancara adalah Tanya jawaban yang dilakukan peneliti dengan pihak-pihak yang berkompeten di Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan-peraturan, dan catatan harian lainnya.²⁴

7. Analisis data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang penulis lakukan secara deduktif. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian

²³Supardi, *Metodologi Penelitian* (Mataram: Yayasan cerdas Pres, 2006), h. 88.

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010),

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.²⁵

8. Metode Penulisan

Dalam Pembahasan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deskriptif kualitatif , yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi, atau pengubahan pada variable-variabel yang di teliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang di lakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.²⁶
- b. Induktif, yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil secara khusus.

G. Sistematika Penulisan

Acuan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini berpedoman pada buku paduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum. Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini,

²⁵Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesian Press, 1986), h. 252.

²⁶Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penilitin Pendidikan*. (Bandung :Remaja Rosdakarya, 2011), h. 73.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

BAB I :PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas tentang gambaran secara umum tentang lokasi penelitian yaitu Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru.

BAB III :TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini di jelaskan mengenai pengertian tentang penanganan, pengertian kekerasan, jenis-jenis kekerasan, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan, dampak kekerasan, pengertian gender, pengertian kekerasan berbasis gender, bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender, dampak kekerasan berbasis gender, hak dan posisi perempuan dalam islam, pengertian fiqh siyasah, ruang lingkup fiqh siyasah, ruang lingkup siyasah dusturiah, konsep kekuasaan dalam siyasah dusturiah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Adapun dalam bab ini akan diuraikan data kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, mengenai bagaimana dalam Penanganan dan faktor-faktor yang memengaruhi penanganan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru dan bagaimana dalam perspektif *fiqih siyasah*.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab yang terakhir dari pembahasan skripsi nantinya, yang berisi tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan permasalahan, serta saran-saran dari penulis merupakan harapan penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat, sehingga ditemukan Bagaimana Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dalam perspektif *fiqih siyasah*.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

Berawal dari adanya SK Walikota Tentang Pembentukan P2TP2A Pekanbaru Tahun 2012. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 190 Tahun 2012 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Setelah tiga tahun berjalan kemudian terjadi perubahan dengan dikeluarkannya SK Perubahan Pengurus P2TP2A Kota Pekanbaru pada tahun 2015.³³

Tahun 2018 dengan keluarnya Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan UPT PPA, sehingga sementara berubah nama menjadi PPA. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.³⁴

³³Dra. Ria Dina Srikadarini, Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru, Pekanbaru, *Wawancara* 01 Februari 2021

³⁴Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak, Pasal 1 Ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.³⁵ UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi layanan:

1. Pengaduan masyarakat;
2. Penjangkauan korban;
3. Pengelolaan kasus;
4. Mediasi; dan
5. Pendampingan korban.³⁶

Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT. PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. UPT. PPA merupakan Unit Pelaksana Teknis Kelas A. Ketentuan lebih lanjut melalui Keputusan Walikota dan/ atau Kepala Dinas.³⁷

UPT. PPA menyelenggarakan fungsi teknis operasional bidang perlindungan perempuan dan anak, yakni :

³⁵ *Ibid.*, Pasal 4

³⁶ *Ibid.*, Pasal 5

³⁷ Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Pasal 2

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Pengaduan masyarakat;
2. Penjangkauan korban;
3. Pengelolaan kasus;
4. Penampungan sementara;
5. Mediasi; dan
6. Pendampingan korban.

UPT PPA dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT PPA. Jumlah dan jenis jabatan fungsional dan/ atau pekerja/tenaga profesi lainnya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota dan/ atau Keputusan Kepala Dinas.³⁸

B. Dasar Hukum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

³⁸ *Ibid.*, Pasal 3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Peraturan Walikota Pekanbaru No 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.³⁹

C. Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

UPT PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Kepala UPT PPA

1. Kepala UPT PPA mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
2. Kepala UPT PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perencanaan kegiatan teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksana tugas.
 - b. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksana tugas UPT PPA.

³⁹ Dra. Ria Dina Sriadarini, *Op. cit*

- c. Pelaksanaan bimbingan tugas tugas kepada bawahan pada UPT PPA sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang di berikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
- d. Pelaksanaan fasilitasi operasional terkait teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksana tugas berjalan efektif dan efisien.
- e. Penyiapan bahan operasional terkait teknis operasional pemberian layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efesien.
- f. Pemeriksaan hasil kerja bawahan di lingkungan UPT PPA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan.
- g. Pelaksanaan evaluasi kegiatan di lingkungan UPT PPA dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang.
- h. Penyiaran laporan pelaksanaan kinerja di lingkungan UPT PPA sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sub Bagian Tata Usaha

1. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja ketatausahaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan bahan rencana program dan kegiatan UPT PPA.
 - b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan rumah tangga serta kearsipan.
 - c. Pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pendanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan barang milik daerah di lingkungan UPT PPA.
 - d. Pelaksanaan urusan keprotokolan dan palayan hubungan masyarakat.
 - e. Penyusunan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional UPT PPA.
 - f. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan berkala UPT PPA.
 - g. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - h. Pelaksanaan bimbingan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar.
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁴⁰

⁴⁰Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019, *op. cit* Pasal 5

D. Bentuk Bentuk Kegiatan UPT PPA Kota Pekanbaru

Berdasarkan Permen PPPA No. 4 Pasal 1 UPT PP memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.⁴¹

Adapun bentuk-bentuk kegiatan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Pengaduan masyarakat
2. Penjangkauan korban
3. Pengelolaan kasus
4. Penampungan sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan Korban⁴²

E. Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru

Pengorganisasian UPT PPA disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan wilayah. Sarana tersebut akan dibentuk berdasarkan hasil rapat koordinasi yang melibatkan pemerintah bersama organisasi/lembaga masyarakat termasuk dunia usaha/swasta, untuk menentukan mekanisme kerja selanjutnya. Pada tahap ini harus ditetapkan struktur organisasi UPT PPA. Beserta uraian tugas masing-masing bagian didalamnya mulai dari pengung

⁴¹Dra. Ria Dina Srikadarini, *op. cit*

⁴²*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

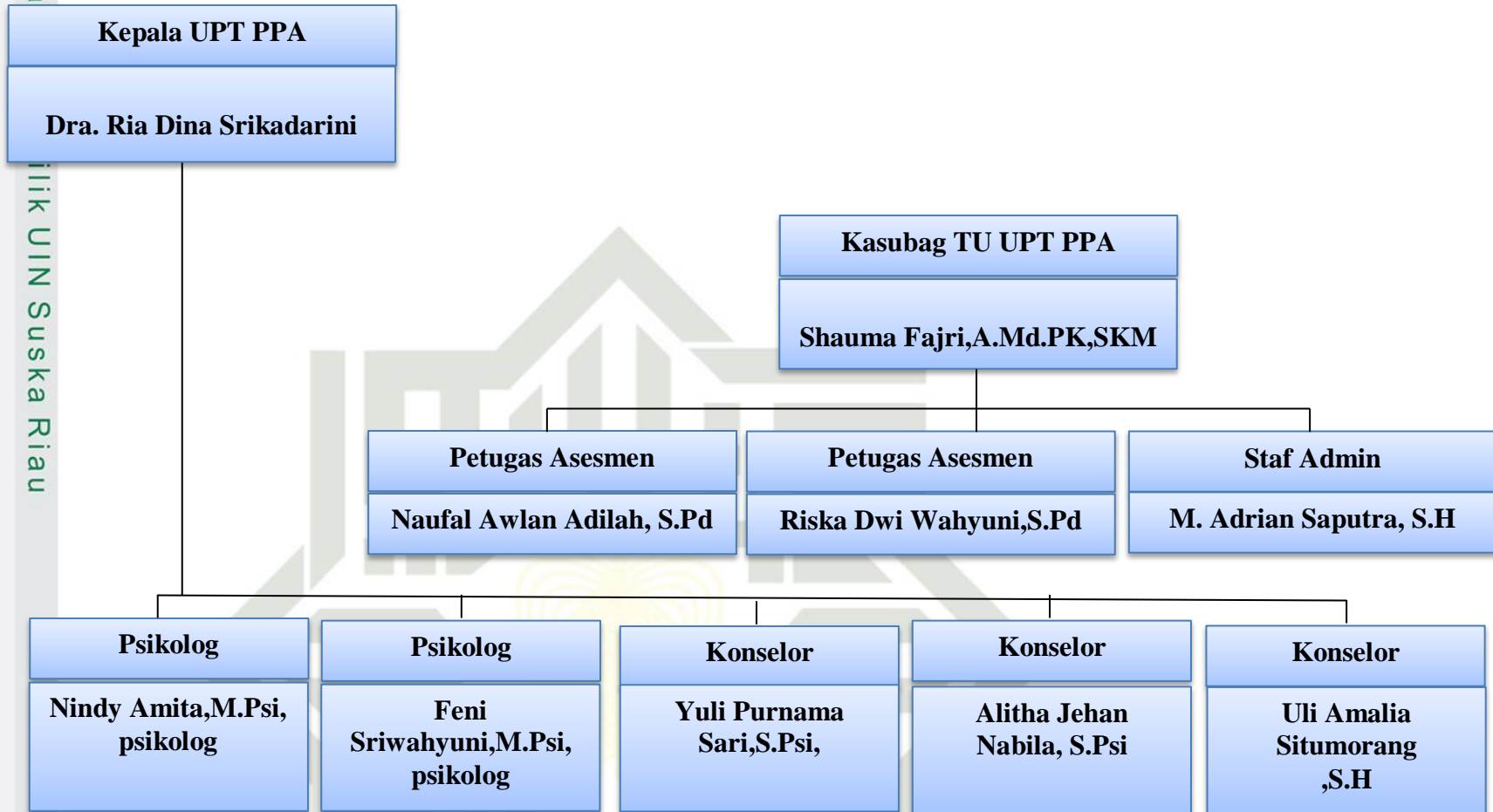
jawab sampai anggotanya. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah para pengurus, pengelola, dan tenaga profesi yang terlibat di UPT PPA adalah individu-individu yang memiliki jiwa sukarela, peka dan mampu memberikan perhatian penuh terhadap perlindungan perempuan dan kesejahteraan serta perlindungan anak.

Dalam struktur organisasi di UPT PPA terdiri dari Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana, dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Tenaga Ahli sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) poin d meliputi : Psikolog Klinis, Pekerja Sosial, Konselor, Advokat, dan Mediator.⁴³

⁴³Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019, , *op. cit* Pasal 4

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

KOTA PEKANBARU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun t

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. Penanganan Kasus

1. Pengertian Penanganan Kasus

Menurut Prayitno, penanganan kasus pada umumnya dapat dilihat sebagai keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus (yang dialami oleh seseorang) yang dihadapkan kepadanya sejak awal sampai dengan diakhirinya perhatian dan tindakan tersebut.⁴⁴

Dalam pengertian itu penanganan kasus meliputi:

- a. Pengenalan awal tentang kasus, yang dimulai sejak mula kasus itu dihadapkan.
- b. Pengembangan ide-ide tentang rincian masalah yang terkandung di dalam kasus itu
- c. Penjelajahan lebih lanjut tentang segala seluk beluk kasus tersebut, dan akhirnya
- d. Mengusahakan upaya-upaya kasus untuk mengatasi atau memecahkan sumber pokok permasalahan itu.⁴⁵

2. Langkah-Langkah Penanganan Kasus

Sebagai gambaran umum, menurut Prayitno keterkaitan antara permasalahan awal, konsep ide/ide tentang rincian, kemungkinan, sebab dan akibat, serta penanganan masalah secara khusus. Kita bisa

⁴⁴Prayitno dan Erman Amti, *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004). h. 76

⁴⁵*Ibid.*, h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membayangkan berbagai permasalahan yang dapat dikenali pada mulanya melalui:

- a. Deskripsi awal kasus
- b. Ide-ide tentang rincian permasalahan, kemungkinan sebab dan kemungkinan akibat,
- c. Upaya dan hasil penjelajahan lebih lanjut terhadap setiap permasalahan yang terkandung pada kasus yang dimaksud, dan
- d. Upaya penanganan secara khusus terhadap permasalahan pokok yang menjadi sumber permasalahan pada umumnya.⁴⁶

Dengan demikian, penangan kasus merupakan seseorang yang memberikan perhatian secara totalitas dan mengambil tindakan dari awal hingga akhir terhadap sebuah kasus. Adapun langkah-langkah dalam penanganan kasus diatas merupakan suatu perhatian dan tindakan yang harus diambil dalam penanganan kasus.

B. Kekerasan Berbasis Gender

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan (violence) artinya tindak kekerasan, baik fisik maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin lainnya. Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perempuan dianggap feminisme dan laki-laki maskulin. Karakter ini kemudian mewujudkan dalam ciri-ciri psikologis, seperti laki-laki dianggap gagah, kuat,

⁴⁶*Ibid.*, h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berani dan sebagainya. Sebaliknya perempuan dianggap lembut, lemah, penurut dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perbedaan itu. Namun ternyata perbedaan karakter tersebut melahirkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan bahwa perempuan itu lemah, itu diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena, berupa tindakan kekerasan.⁴⁷

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (overt) atau tertutup (covert), dan baik yang bersifat menyerang (offensive) atau bertahan (defensive). Yang disertai dengan penggunaan kekuatan kepada orang lain. Jika orang sepakat bahwa setiap tindakan yang mengganggu fisik atau kondisi psikologi seseorang adalah satu bentuk kekerasan, maka seharusnya orang menyadari bahwa rasisme, polusi atau kemiskinan dapat juga dikategorikan sebagai bentuk kekerasan. Kekerasan yang dimaksud disini adalah kekerasan setiap tindakan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dalam pengertian yang luas atau pelanggaran yang menghalangi manusia memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, maka aksi kekerasan bisa mencakup kekerasan dan kekerasan struktural.⁴⁸

Dengan demikian, kekerasan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan kepada seorang laki-laki atau perempuan yang mengakibatkan fisik atau kondisi psikologi seseorang tersebut menjadi terganggu. kekerasan dapat terjadi pada ruang

⁴⁷<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23#:~:text=Marjinalisasi,adalah%20dengan%20menggunakan%20asumsi%20gender> 06 Maret 2021

⁴⁸Ridwan, *op. cit.*, h. 57

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkup rumah tangga, lingkungan sekitar tempat tinggal, teman sebaya, dan tempat umum.

2. Jenis-jenis Kekerasan

Aksi kekerasan yang sering terjadi di sekitar kita dilihat dari jenisnya dapat diklasifikasikan kedalam empat jenis yaitu kekerasan langsung (direct violence), kekerasan tidak langsung (indirect violence), kekerasan represif (refressive violence). Dan kekerasan alienatif (alienating violence).⁴⁹

a. Kekerasan Langsung

Kekerasan langsung merujuk pada tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung. Yang termasuk dalam kategori ini adalah semua bentuk pembunuhan individual atau kelompok, seperti pemusnahan etnis, kejahatan perang. Pembunuhan masal dan juga semua bentuk tindakan paksa atau brutal yang menyebabkan penderitaan fisik atau psikologis seseorang (pengusiran paksa terhadap suatu masyarakat, penculikan, pemerkosaan, penganiyaan). Semua tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengganggu hak asasi manusia yang paling mendasar yakni hak untuk hidup.⁵⁰

b. Kekerasan Tidak Langsung

Kekerasan tidak langsung adalah tindakan yang membahayakan manusia, bahkan kadang-kadang sampai anacaman

⁴⁹*Ibid.*, h. 58

⁵⁰*Ibid.*, h.58

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kematian, tetapi tidak melibatkan hubungan langsung antara korban dan pihak (orang, masyarakat atau institusi) yang bertanggungjawab atas kekerasan tersebut. Di sini terdapat sub kategori yang bisa dibedakan, yakni kekerasan dengan pembiaran dan kekerasan termediasi.⁵¹

Kekerasan dengan atau karena pembiaran (violence by omission) digambarkan dengan seseorang dalam keadaan bahaya dan tidak ada orang yang menolongnya . kalau hendak memberi hukuman kepada pelakunya yaitu orang yang mengetahui tetapi menolak untuk memberikan pertolongan segera kepada korban. Maka kita perlu menerapkan konsep criminal failure to intervene.⁵²

Isu kelaparan dapat menggambarkan bentuk kekerasan tidak langsung. Ketika manusia menderita kelaparan atau kurang makan, bukan karena akibat bencana alam tetapi karena alasan-alasan yang bersifat sosial dan politik (pendapatan yang rendah, distribusi makanan yang tidak merata, kebijakan ekspor yang mengabaikan kebutuhan masyarakat local), maka masyarakat ini bisa di anggap sebagai korban kekerasan sosial (sosial violence) yang dilakukan oleh masyarakat, institusi sosial ataupun oleh negara. Oleh karena itu Mark Twain mengatakan "kemiskinan sebagai teror yang paling mengerikan".⁵³

Kebalikan dari violence by omission (kekerasan karena pembiaran) yang terjadi secara pasif. Adalah hasil intervensi manusia secara sengaja terhadap lingkungan alam atau sosial yang membawa

⁵¹*Ibid.*, h.59

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengaruh secara tidak langsung pada manusia lain. Pengaruh ini tidak dirasakan segera. Tetapi datang melalui faktor perantara. Sehingga hubungan antara orang atau institusi yang bertanggungjawab terhadap korbannya tidaklah langsung. Semua bentuk ekosida yaitu tindakan penghacuran, gangguan dan pengrusakan alam lingkungan hidup, termasuk dalam kekerasan jenis ini. Karena akan membahayakan kesehatan dan hidup manusia dan menyebabkan kesengsaraan.⁵⁴

Terdapat dua catatan yang perlu diperhatikan dalam kaitan antara kekerasan karena pembiaran dan kekerasan termeditasi. Pertama, di antara violence by omission dan mediated violence terdapat banyak sisi yang saling melengkapi. Kekerasan karena pembiaran dicirikan dengan kondisi yang tetap, sedangkan kekerasan yang termediasi lebih sering dikaitkan dengan gerak dinamis yang menghubungkan antara modifikasi lingkungan sebagai penyebab terjadinya kekerasan dan kekerasan itu sendiri. Akibat dari kekerasan yang dimediasi seringkali dapat menjelaskan asal mula kekerasan karena pembiaran, misalnya dalam kasus kelaparan. Kedua, orang atau institusi yang bertanggungjawab atas tindak kekerasan tidak langsung belum tentu dianggap pelaku kejahatan oleh hukum dan masyarakat. Intervensi atau tindakan berbahaya yang diambilnya bisa jadi justru diniatkan untuk menghargai hukum atau demi menciptakan perdamaian.⁵⁵

⁵⁴*Ibid.*, h. 60

⁵⁵*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kekerasan Represif

Kekerasan represif berkaitan dengan pencabutan hak dasar untuk bertahan hidup dan untuk dilindungi dari kesakitan dan penderitaan. Oleh karena itu termasuk pelanggaran hak asasi manusia seperti mengekang kebebasan, martabat manusia dan kesamaan hak bagi setiap manusia. Kekerasan represif terkait dengan tiga hak dasar manusia yaitu hak sipil, hak politik dan hak sosial. Hak sipil adalah terkait dengan kebebasan berfikir, beragama, kebebasan berorganisasi dan privasi kesamaan di hadapan hukum. Hak politik berkaitan dengan hak berpartisipasi masyarakat secara demokratis dalam kehidupan politik seperti mengikuti pemilihan umum dan kebebasan berbicara dan berpendapat. Sedangkan hak sosial berkaitan dengan larangan untuk menciptakan atau memiliki serikat buruh atau larangan untuk melakukan mogok kerja.⁵⁶

d. Kekerasan Alienatif

Kekerasan alienatif merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya hak pertumbuhan kejiwaan (emosi), budaya atau intelektual (rights to emotional, cultural or intellectual growth). Pentingnya memasukan hak-hak asasi manusia kedalam jenis kekerasan alienatif ini adalah untuk menegaskan bahwa manusia juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan non material, kepuasan kerja, terlibat dalam kegiatan-kegiatan kreatif, kebutuhan

⁵⁶*Ibid.*, h. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak akan kasih sayang, rasa kepemilikan secara sosial atau identitas budaya.⁵⁷

Salah satu bentuk kekerasan alienatif yang paling kejam adalah apa yang disebut dengan pemusnahan etnis (ethnocide) yaitu kebijakan atau tindakan yang betul-betul mengubah kondisi material atau sosial menjadi di bawah satu identitas cultural kelompok tertentu yang dominan.⁵⁸

Sebagai alat analisis, konsep alienasi sebagai kekerasan ini bisa berguna tidak hanya untuk melihat fenomena pemusnahan etnis (ethnocide) tetapi juga dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena kehidupan sehari-hari secara umum seperti situasi kerja yang tidak manusiawi di industri tertentu (pekerjaan rutin, pemaksaan hubungan sosial yang hierarkhis) atau peminggiran orang-orang yang berusia lanjut dengan menolak peran sosialnya.⁵⁹

Dengan demikian penulis menyimpulkan, jenis-jenis kekerasan diklasifikasikan menjadi empat yaitu (1) kekerasan langsung yang merujuk pada suatu tindakan yang menyerang fisik atau psikologis seseorang secara langsung, contohnya pembunuhan (genosida/pembunuhan manusia, pembunuhan masal, pembunuhan individu), tindakan brutal (penyiksaan, pemerkosaan, dan penganiayaan), pembatasan/tekanan fisik (penggusuran paksa, penculikan, pemenjaraan dan buruh kerja paksa). (2) kekerasan tidak langsung merupakan kekerasan yang tidak melibatkan hubungan

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*, h. 62

⁵⁹ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung antara pelaku dan korban, contohnya tidak adanya perlindungan dari kekerasan sosial dan kekerasan dengan mediasi. (3) kekerasan represif merupakan kekerasan yang berkaitan dengan pencabutan hak dasar untuk bertahan hidup dan untuk dilindungi dari kesakitan dan penderitaan, contohnya perampasan hak-hak fundamental (hak-hak sosial, kesetaraan gender, perlindungan atas hak pribadi dan hak sosial, hak-hak sipil warga negara, dan hak-hak politik). (4) kekerasan alienatif merupakan kekerasan merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, contohnya hak pertumbuhan kejiwaan, budaya atau intelektual (pengasingan habitat dari populasinya, pengasingan dari pergaulan sosial, pemusnahan etnis).

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan

Hosking menyebutkan bahwa secara umum penyebab terjadinya tindak kekerasan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu faktor individu dan faktor sosial. Faktor individu berkaitan erat dengan kecenderungan individu untuk berbuat kekerasan. Sementara itu, faktor sosial merupakan kondisi lingkungan yang mendorong seseorang berbuat kekerasan.⁶⁰

Faktor individu, dari sisi psikologis, motivasi utama untuk melakukan tindak kekerasan dapat dipandang sebagai ketidakmampuan untuk menahan emosi, bahkan kekerasan digunakan media mengeskpresikan perasaan seseorang seperti marah, frustrasi atau sedih. Kesulitan mengontrol emosi sering menjadikan seseorang berbuat kekerasan. Prilaku kekerasan terkadang juga disebabkan karena orang

⁶⁰Statik Gender Tematik- Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia, 2017. (Jakarta: Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak). h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tumbuh di lingkungan dimana kekerasan sering dipertontonkan, sehingga kekerasan dipahami sebagai perilaku yang wajar. Terkadang kekerasan yang dilakukan individu digunakan sebagai cara-cara memengaruhi orang lain untuk mengendalikan situasi.⁶¹

Beberapa faktor yang melekat pada individu pelaku kekerasan juga dapat dipengaruhi oleh berbagai hal seperti pengaruh teman sejawat, kurang perhatian, merasa tidak berharga keberadaannya, pernah mengalami perlakuan buruk, dan menyaksikan kekerasan di rumah atau di luar rumah. Menurut Hosking, faktor utama akan kecenderungan seseorang untuk berbuat kekerasan adalah kurangnya rasa empati. Meskipun seorang bayi yang lahir dipengaruhi kapasitas empati pada dirinya, akan tetapi tumbuhnya rasa empati tersebut bergantung pada apa yang dia pelajari dan lihat dari reaksi orang dewasa terhadap penderitaan atau rasa sakit orang lain.⁶²

Faktor sosial budaya, kondisi sosial budaya yang dapat mendorong terjadinya kekerasan sering merefleksikan adanya ketimpangan sosial atau ekonomi antar kelompok masyarakat. Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan Hosking menyatakan bahwa sejumlah penelitian mengidentifikasi keterkaitan antara ketimpangan gender dengan tingkat kekerasan terhadap perempuan. Jacobson mengidentifikasi beberapa faktor sosial yang mungkin menciptakan kondisi yang mengantarkan pada terjadinya kekerasan antara lain:

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.*, h.20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sikap permisif masyarakat akan kekerasan terhadap perempuan
- b. Kontrol laki-laki dalam pengambilan keputusan dan pembatasan terhadap kebebasan perempuan
- c. Identitas dan peran laki-laki dan perempuan yang kaku di masyarakat
- d. Hubungan antar sesama yang merendahkan perempuan
- e. Lingkungan kumuh dan padat penduduk
- f. Keterpaparan pada kekerasan⁶³

Jadi berdasarkan penjelasan diatas menurut penulis penyebab terjadinya tindak kekerasan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu faktor individu dan faktor sosial. Faktor individu berkaitan erat dengan kecenderungan individu untuk berbuat kekerasan. Sementara itu, faktor sosial merupakan kondisi lingkungan yang mendorong seseorang berbuat kekerasan.

4. Pengertian Kekerasan Berbasis Gender

Istilah gender harus dibedakan dengan istilah jenis kelamin (seks) Ann Oakley, ahli sosiologi Inggris merupakan orang yang mula-mula memberikan pembedaan dua istilah itu. Pentingnya pemahaman dan pembedaan antara konsep seks dan gender adalah dalam rangka melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial khususnya yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan

⁶³*Ibid.*, h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena ada kaitan yang erat antara perbedaan gender (gender differences) dan ketidakadilan masyarakat secara lebih luas.⁶⁴

Secara bahasa, kata gender (baca jender) berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin. Dalam *Womens' Studies Encyclopedia*. Sebagaimana di kutip oleh Mufidah Ch, dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep cultural, berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan Hilary M. Lips mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan.⁶⁵

Pengertian lain tentang gender sebagaimana dirumuskan oleh Mansour Fakih, gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan cultural. Sifat gender yang melekat pada perempuan misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap: kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan antara kaum laki-laki dan perempuan. Artinya, ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa.⁶⁶

Sedangkan pengertian jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin tertentu. Misalnya bahwa manusia laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, sperma, dan jakun. Sedangkan

⁶⁴Ridwan, *op. cit.*, h.16

⁶⁵*Ibid.*

⁶⁶*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan adalah manusia yang memiliki vagina, Rahim dan alat menyusui. Alat alat tersebut melekat secara biologis yang bersifat permanen dan tidak dapat dipertukarkan dan itu semua merupakan pemberian Tuhan yang kemudian disebut sebagai kodrat.⁶⁷

Kekerasan Berbasis Gender (selanjutnya disebut KBG) adalah “sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan berbagai macam bentuk tindakan kekerasan yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pada seseorang, yang dilakukan berdasarkan perbedaan sosial termasuk gender laki-laki dan perempuan, yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk berupa ancaman, paksaan dan berbagai bentuk lainnya yang merampas kebebasan seseorang, baik di ruang publik/ umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi. Istilah “KBG” seringkali dipergunakan secara bersamaan dengan istilah “kekerasan terhadap perempuan” karena istilah “KBG” menyoroti dimensi gender dalam bentuk-bentuk tindakan ini terjadi karena konstruksi gender telah menempatkan status perempuan sebagai kelas kedua di dalam masyarakat dan oleh karena relasi kuasa yang tidak setara ini, perempuan menjadi sangat rentan terhadap kekerasan, KBG dapat terjadi di wilayah pribadi (pada pertemanan, pacaran) maupun publik (kekerasan di tempat kerja atau di tempat umum), dalam situasi normal ataupun sulit (bencana, perang, konflik), baik yang terjadi di tingkat individu, komunitas, atau negara.⁶⁸

⁶⁷Ibid., h. 17

⁶⁸https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Protokol_Penanganan_Kasus_Kekerasan_Terdapat_Perempuan_di_Masa_Pandemi_COVID-19.pdf 06/03/21 h.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan berbasis gender tidak hanya terjadi di dunia nyata saja, tetapi juga dapat terjadi pada dunia maya yaitu, kekerasan berbasis gender online (KBGO) atau KBG yang difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Jika tidak, maka kekerasan tersebut masuk dalam kategori kekerasan umum di ranah online.⁶⁹

Dengan demikian, kekerasan berbasis gender atau disingkat menjadi (KBG) merupakan kekerasan yang berbagai macam bentuk tindakan kekerasan yang membahayakan atau mengakibatkan penderitaan pada seseorang, yang dilakukan berdasarkan perbedaan sosial termasuk gender laki-laki dan perempuan, yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk berupa ancaman, paksaan dan berbagai bentuk lainnya yang merampas kebebasan seseorang, baik di ruang publik/ umum maupun dalam lingkungan kehidupan pribadi. Kekerasan berbasis gender tak hanya terjadi pada dunia nyata tetapi juga dapat terjadi pada dunia maya atau disebut dengan kekerasan berbasis gender online (KBGO) yang difasilitasi teknologi, sama seperti kekerasan berbasis gender di dunia nyata, tindak kekerasan tersebut harus memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual.

⁶⁹<https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf> Diakses pada 29 Maret 2021

5. Bentuk-Bentuk Kekerasan Berbasis Gender

Bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender terbagi menjadi kekerasan berbasis gender yang terjadi dunia nyata dan dan kekerasan berbasis gender yang terjadi di dunia maya yaitu :

a. Bentuk kekerasan berbasis gender dunia nyata

Adapun bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dunia nyata terbagi menjadi :

- 1) Perkosaan/Percobaan perkosaan adalah hubungan seksual yang tidak disetujui bersama. Hal ini termasuk penyerangan terhadap bagian tubuh manapun dengan menggunakan alat kelamin dan/atau penyerangan terhadap alat kelamin atau lubang dubur dengan benda apapun atau bagian tubuh apapun. Perkosaan dan percobaan perkosaan mengandung unsur kekuasaan, ancaman, dan/atau paksaan. Penetrasi dalam bentuk apapun adalah perkosaan. Upaya untuk memperkosa seseorang tetapi tanpa penetrasi adalah percobaan perkosaan. Perkosaan/percobaan perkosaan termasuk:
 - a) Perkosaan terhadap perempuan dewasa.
 - b) Perkosaan terhadap anak-anak (perempuan atau laki-laki), termasuk juga hubungan sedarah (incest).
 - c) Perkosaan yang dilakukan oleh lebih dari satu pelaku.
 - d) Perkosaan dalam pernikahan, antara suami dan istri.
 - e) Perkosaan terhadap lakilaki, atau dikenal sebagai sodomi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Penganiayaan seksual adalah bentuk nyata atau ancaman fisik secara seksual, baik dengan menggunakan kekerasan atau di bawah ketidaksetaraan atau kondisi pemaksaan.
- 3) Eksploitasi seksual adalah bentuk nyata atau percobaan penganiayaan yang mengandung unsur kerentanan, perbedaan kekuasaan, atau kepercayaan, untuk tujuan-tujuan seksual. Termasuk untuk keuntungan finansial, sosial atau politik dengan mengeksploitasi seseorang secara seksual.
- 4) Kekerasan seksual “tindakan seksual apapun, percobaan untuk melakukan kegiatan seksual, kata-kata atau cumbuan seksual yang tidak diinginkan, atau perdagangan seksualitas seseorang, menggunakan paksaan, ancaman fisik, oleh siapapun apapun hubungannya dengan si korban, dimana pun, tidak hanya di rumah atau di tempat kerja”. Kekerasan seksual terjadi dalam banyak bentuk, termasuk perkosaan, perbudakan seks, dan/atau perdagangan, kehamilan yang dipaksakan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan/atau penganiayaan, dan pengguguran kandungan yang dipaksakan.
- 5) Kekerasan fisik mengacu pada tindakan yang menyakiti tubuh.
- 6) Kekerasan psikologis mengacu pada tindakan atau peniadaan yang menyebabkan atau dapat menyebabkan penderitaan mental atau emosional, seperti –namun tidak terbatas pada- intimidasi, pelecehan, penguntitan, pengrusakan properti/barang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipermalukan, kekerasan verbal, dan perselingkuhan. Menyaksikan kekerasan terhadap anggota keluarga, pornografi, menyaksikan penyiksaan hewan, atau melarang mengunjungi anak juga merupakan bentuk dari kekerasan psikologis.

- 7) Penelantaran ekonomi merujuk pada perilaku yang membuat perempuan bergantung secara finansial, misalnya dengan cara:
 - a) Menarik dukungan finansial atau melarang korban bekerja.
 - b) Diambil atau diancam untuk diambil sumber penghasilannya dan hak untuk menikmati harta bersama.
 - c) Mengontrol uang dan kepemilikan korban.
- 8) “Praktik-praktik berbahaya” adalah bentuk dari ketidaksetaraan gender dan norma sosial, budaya, dan agama yang diskriminatif, serta tradisi, yang berhubungan dengan posisi perempuan dalam keluarga, komunitas dan masyarakat dan untuk mengendalikan kebebasan perempuan, termasuk seksualitasnya.⁷⁰

b. Bentuk kekerasan berbasis gender di dunia maya

Adapun bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dunia maya terbagi menjadi :

- 1) Pelanggaran privasi
 - a) Mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuannya tanpa persetujuan

⁷⁰https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Protokol_Penanganan_Kasus_Kekerasan_Terhadap_Pemempuan_di_Masa_Pandemi_COVID-19.pdf 06 Maret 2021 h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Doxing atau menggali dan menyebarkan informasi pribadi seseorang, kadang-kadang dengan maksud untuk memberikan akses untuk tujuan jahat lainnya, misal pelecehan atau intimidasi di dunia nyata
- 2) Pengawasan dan pemantauan
 - a) Memantau, melacak dan mengawasi kegiatan online atau offline
 - b) Menggunakan spyware atau teknologi lainnya tanpa persetujuan
 - c) Menggunakan GPS atau geo-locator lainnya untuk melacak pergerakan target
 - d) Menguntit atau stalking
- 3) Perusakan reputasi/kredibilitas
 - a) Membuat dan berbagi data pribadi yang salah (mis. akun media sosial) dengan tujuan merusak reputasi pengguna
 - b) Manipulasi atau membuat konten palsu
 - c) Mencuri identitas dan impersonasi (mis. berpura-pura menjadi orang tersebut dan membuat gambar atau postingan yang berpotensi merusak reputasi orangnya dan membagikannya secara publik)
 - d) Menyebarluaskan informasi pribadi untuk merusak reputasi seseorang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Membuat komentar atau postingan yang bernada menyerang, meremehkan, atau lainnya yang palsu dengan maksud mencoreng reputasi seseorang (termasuk pencemaran nama baik)
- 4) Pelecehan (yang dapat disertai dengan pelecehan offline)
 - a) Online harassment, pelecehan berulang-ulang melalui pesan, perhatian, dan / atau kontak yang tidak diinginkan
 - b) Ancaman langsung kekerasan seksual atau fisik
 - c) Komentar kasar
 - d) Ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target pada gender atau seksualitas tertentu
 - e) Penghasutan terhadap kekerasan fisik
 - f) Konten online yang menggambarkan perempuan sebagai objek seksual
 - g) Penggunaan gambar tidak senonoh untuk merendahkan wanita
 - h) Menyalahgunakan, mempermalukan wanita karena mengekspresikan pandangan yang tidak normative
- 5) Ancaman dan kekerasan langsung
 - a) Perdagangan perempuan melalui penggunaan teknologi, termasuk pemilihan dan persiapan korban (kekerasan seksual terencana)
 - b) Pemerasan seksual
 - c) Pencurian identitas, uang, atau property

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Peniruan atau impersonasi yang mengakibatkan serangan fisik
- 6) Serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu
 - a) Meretas situs web, media sosial, atau email organisasi dan komunitas dengan niat jahat
 - b) Pengawasan dan pemantauan kegiatan anggota komunitas/organisasi
 - c) Ancaman langsung kekerasan terhadap anggota komunitas/organisasi
 - d) Pengepungan (mobbing), khususnya ketika memilih target untuk intimidasi atau pelecehan oleh sekelompok orang, daripada individu
 - e) Pengungkapan informasi yang sudah dianonimkan, seperti alamat tempat penampungan⁷¹

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kekerasan berbasis gender dunia nyata lebih kepada penyerangan fisik secara langsung dan psikologis, sedangkan kekerasan berbasis gender dunia maya merupakan kekerasan yang sifatnya menyerang privasi, psikologis dan finansial.

6. Dampak Kekerasan Berbasis Gender

Kekerasan berbasis gender (KBG) memiliki dampak yang sangat signifikan pada korbannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang yang berupa dampak pada aspek fisik, psikologis, dan sosial. Dampak ini tidak terjadi secara tunggal dan terpisah akan tetapi saling berkaitan yang

⁷¹<https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf> Diakses 28 Maret 2019

dapat menambah peliknya masalah yang dialami korban dan keluarganya. Misalnya dampak fisik berakibat pada penderitaan psikologi korban.

Dampak Fisik	
Jangka Pendek/Langsung	Jangka Menengah dan Panjang
<ul style="list-style-type: none"> • Luka-luka fisik dari yang ringan hingga berat, sampai dengan kehilangan anggota tubuh bahkan kematian • Kehamilan yang tidak diinginkan, tertular penyakit menular seksual, mengalami risiko lebih besar untuk tertular HIV/AIDS, serta rusaknya organ reproduksi. • Pemaksaan fisik memang seringkali digunakan dalam perkosaan akan tetapi tidak selalu demikian, sehingga korban tidak selalu mengalami luka-luka pada tubuh, apalagi bila pelaku sudah paham strategi agar korban tidak sampai terluka secara fisik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kehamilan yang tidak diinginkan dan umumnya berakhir dengan aborsi yang tidak aman. • Melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan dengan keluhan fisik yang lebih meningkat karena secara psikologis menolak kehamilan tersebut. • Kondisi kesehatan yang menurun akibat luka permanen atau tekanan psikis yang ditimbulkan karena kejadian kekerasan seksual, cacat tubuh, penyakit infeksi seksual kronis, mengidap HIV/AIDS, tidak mendapat keturunan, kematian. • Pendarahan atau infeksi pada vagina, pertumbuhan jaringan yang tidak normal pada vagina, menurunnya hasrat seksual, sakit pada panggul yang kronis, infeksi saluran kencing kronis serta peradangan pada vagina.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dampak Psikologis/Mental	
Jangka Pendek/Langsung	Jangka Menengah dan Panjang
<ul style="list-style-type: none"> • Mengalami kebingungan, rasa tidak percaya, hampa, marah, sedih, tidak berdaya, malu, menjadi agresif, menyalahkan diri sendiri • Menyesali keadaan dalam arti memiliki pikiran-pikiran “seandainya aku ...”, dll • Mempertanyakan atau menyalahkan Tuhan. • Menghindari tempat kejadian atau tempat yang serupa dengan tempat kejadian. • Rasa takut atau muak pada pelaku atau orang yang menyerupai pelaku • Mengalami mimpi buruk, sulit tidur • Menarik diri, sulit berkonsentrasi, kehilangan nafsu makan. • Merasa diri kotor atau tidak berharga, kehilangan kepercayaan diri, merasa jijik pada diri sendiri dan pada segala sesuatu yang mengingatkan korban pada pelaku atau kejadian. • Memiliki pikiran yang berulang-ulang tentang kejadian • Tidak ingat dengan hal-hal detil, kehilangan orientasi diri, waktu dan tempat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak jangka pendek masih dapat terus dialami. • Mengalami gangguan psikologis lebih berat misalnya depresi, gangguan identitas terpecah. • Bunuh diri atau keinginan untuk bunuh diri. • Mengalami gangguan stres pasca trauma • Mengalami gangguan makan, gangguan tidur • Memiliki masalah personal dengan lawan jenis, hasrat seksual menurun, menjadi tidak tertarik pada lawan jenis. • Perilaku seks berisiko yang tertampil dalam bentuk berganti-ganti pasangan • Ketergantungan pada rokok atau NAPZA. • Perilaku yang melanggar aturan dan hukum seperti mencuri atau membolos • Skeptis pada sistem hukum dan nilai-nilai kehidupan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dampak Sosial, Budaya, dan Ekonomi	
Jangka Pendek/Langsung	Jangka Menengah dan Panjang
<ul style="list-style-type: none"> • Dipersalahkan atas kejadian yang menimpa dirinya. • Dipertanyakan moralitas dan kesucian dirinya. • Dipertanyakan niat dan motivasinya • Diadili oleh masyarakat, dinikahkan dengan pelaku atau dengan siapa saja atas keputusan keluarga karena dianggap sudah 'rusak'. • Diceraiakan sepihak atau ditinggalkan oleh pasangan, dihukum oleh pasangan • Dikucilkan oleh keluarga, lingkungan, teman kerja. • Kehilangan pekerjaan atau peran dalam keluarga dan komunitas. • Harus bertanggungjawab untuk memperbaiki nama baik keluarga bahkan komunitas. • Dikeluarkan dari komunitas, sekolah atau universitas. • Mendapatkan kekerasan seksual lagi sebagai bentuk hukuman atau intervensi kuratif terutama dalam kasus homoseksual. • Dipaksa atau dibujuk untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Dampak jangka pendek masih bisa terus terjadi • Mendapatkan stigma negatif karena terus melekat. • Masa depan suram karena putus sekolah atau kehilangan pekerjaan. • Ketergantungan ekonomi, pengangguran. • Kembali menjadi korban karena sistem hukum dan adat, penegak hukum, konselor, pemuka agama, petugas kesehatan, pemuka adat dan komunitas, dll. • Rentan menjadi korban perdagangan orang dan pekerja seks komersil. • Terpaksa menjadi orang tua tunggal dengan anak yang tidak diinginkan korban, dipaksa menyerahkan anak untuk diserahkan pada orang lain/adopsi. • Bila kemudian menikah, korban direndahkan karena dianggap 'bekas', tidak dianggap sebagai manusia seutuhnya, menjadi tunawisma.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

<p>bungkam agar tidak melapor, dipaksa atau dibujuk untuk berdamai dengan pelaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diteror oleh pelaku, difitnah (fakta diputarbalikan untuk melemahkan korban). • Dibunuh, ditekan untuk bunuh diri, ditekan untuk minta ganti rugi kepada pelaku. • Dipaksa untuk aborsi atau sterilisasi. • Dibatasi ruang geraknya termasuk dihalangi mencari pertolongan karena dianggap akan menceritakan aib keluarga. 	
---	--

Dampak yang muncul pada setiap korban/penyintas kekerasan bervariasi tergantung pada karakteristik traumatis tersebut dan penghayatan korban sendiri yang tergantung pada kepribadian, usia, gender, latar belakang korban (pola asuh, pengalaman traumatis sebelumnya, tingkat sosial ekonomi, budaya) serta tidak adanya dukungan dari keluarga atau sosial.⁷²

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa sangat beragam dampak dari kekerasan berbasis gender yaitu dari segi fisik, psikologis, ekonomi, budaya, dan sosial. Dan dampak tersebut bias dialami dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu yang panjang tergantung pada

⁷²https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Protokol_Penanganan_Kasus_Kekerasan_Melawan_Pemerkosaan_dan_Pelecehan_Pada_Masa_Pandemi_COVID-19.pdf 06 Maret 2021 h. 9-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada kepribadian, usia, gender, latar belakang korban (pola asuh, pengalaman traumatis sebelumnya, tingkat sosial ekonomi, budaya) serta tidak adanya dukungan dari keluarga atau sosial.

C. Peraturan Wali Kota

1. Pengertian Peraturan Walikota

Sekalipun tidak disebutkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan tentang peraturan walikota, namun tidak berarti keberadaan peraturan bupati/walikota tanpa alas hukum. Namun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 8 ayat (1) berbunyi :

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibentuk berdasarkan kewenangan. Jadi Peraturan Walikota adalah jenis peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Walikota.⁷³

2. Mekanisme Peraturan Walikota

Peraturan bupati/walikota diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah kemudian digolongkan sebagai salah satu jenis dari peraturan kepala daerah (“Perkada”). Terdapat dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “ peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah perturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota.⁷⁴ Berikut mekanisme pembuatan Perkada.

Dalam pasal 42 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 menerangkan bahwa:

- a. Perkada ditetapkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
- b. Pimpinan perangkat daerah pemrakarsa menyusun rancangan Perkada.
- c. Rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disusun, disampaikan kepada biro hukum provinsi atau nama lainnya

⁷³<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/> Diakses pada 6 April 2021

⁷⁴Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pasal 1 Ayat (5).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya untuk dilakukan pembahasan.⁷⁵

Kemudian, Pasal 110 Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 kemudian menguraikan bahwa:

- a. Rancangan Perkada yang telah dilakukan pembahasan disampaikan kepada kepala daerah untuk dilakukan penetapan dan Pengundangan.
- b. Penandatanganan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kepala daerah.
- c. Dalam hal kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhalangan sementara atau berhalangan tetap, penandatanganan rancangan Perkada dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat kepala daerah.
- d. Pejabat sementara kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melakukan penandatanganan rancangan Perkada, harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri.⁷⁶

Lanjut pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 111:

- a. Penandatanganan Perkada dibuat dalam rangkap tiga
- b. Pendokumentasian naskah asli perkada kemudian dilakukan oleh :
 - 1) sekretaris daerah;
 - 2) perangkat daerah yang membidangi hukum provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota berupa minute; dan

⁷⁵*Ibid.*, Pasal 42 Ayat (1-3)

⁷⁶*Ibid.*, Pasal 110 Ayat (1-4)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) perangkat daerah pemrakarsa.⁷⁷

Penomoran produk hukum daerah terhadap perkara kota/kabupaten dilakukan oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya. Penomoran produk hukum daerah yang berupa pengaturan tersebut menggunakan nomor bulat.⁷⁸

Perkada yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah. Peraturan bupati/peraturan wali kota yang telah diundangkan disampaikan kepada gubernur. Perkada mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Perkada nantinya dimuat dalam jaringan dokumentasi dan informasi hukum.⁷⁹

Perkada yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi oleh kepala bagian hukum kabupaten/kota atau nama lainnya. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai dengan aslinya. Bupati/wali kota menyampaikan peraturan bupati/wali kota kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama tujuh hari setelah ditetapkan.⁸⁰

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Walikota merupakan sumber hukum yang diakui keberadaannya dan mengikat sepanjang di perintahkan oleh peraturan perundang-undangan

⁷⁷Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Pasal 111 Ayat 1-2

⁷⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5db27cf95dfdc/prosedur-pembentukan-peraturan-bupati-walikota/> Diakses pada 6 April 2021

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tingkatnya lebih tinggi yaitu, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Peraturan yang dibentuk berdasarkan kewenangannya.

D. Konsep Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha yafqahu fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam. Sehingga dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.⁸¹ Sedangkan kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.⁸²

Secara etimologis, Abdul Wahab Khallaf mendefenisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.” Adapun Ibn manzhur mendefenisikan siyasah “mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.” Defenisi senada juga dirumuskan oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah “pengaturan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara’”.⁸³

⁸¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Pustaka Adhania Group, 2014). h. 2

⁸² *Ibid.*, h. 3

⁸³ *Ibid.*, h. 4

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu hukum Islam yang membahas tentang pengaturan pemerintahan, politik, pembuatan kebijaksanaan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian fiqh siyasah adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subyek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diatur berdasarkan ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *nash* syariat yang bersifat universal.⁸⁴ Objek kajian fiqh siyasah menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut.

Berkenaan dengan luasnya objek kajian fiqh siyasah, maka dikenal beberapa pembidangan fiqh siyasah. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup fiqh siyasah. Menurut

⁸⁴Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga, 2008), h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasbi Ash Shiddieqy, membagi ruang lingkup fiqh siyasah ke dalam delapan bidang, yaitu:⁸⁵

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* (politik pembuatan peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (politik hukum)
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (politik peradilan)
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (politik ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (politik administrasi negara)
- f. *Siyasah Kharijiyah Syar'iyah/Siyasah Dauliyyah* (politik hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan)

Sedangkan menurut Abul Wahhab Khallaf, ada tiga bidang kajian fiqh siyasah, yaitu:⁸⁶

- a. *Siyasah Dusturiyyah*
- b. *Siyasah Maliyyah*
- c. *Siyasah Kharijiyyah*

Sementara contoh lain dari pembidangan fiqh siyasah terlihat dari kurikulum fakultas syariah, yang membagi fiqh siyasah ke dalam 4 bidang, yaitu:

- a. *Fiqh Dusturiyyah*

⁸⁵ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 30

⁸⁶ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Loc. Cit.*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Fiqh Maliyyah*
- c. *Fiqh Dauliyyah*
- d. *Fiqh Harbiyyah*

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa menurut setiap ahli berbeda-beda atas pembagian pembedangan ruang lingkup fiqh siyasah. pembedangan fiqh siyasah telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan siyasah.

3. Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiah*

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga "dusturi". Kata ini bersal dari bahasa persia. Semula artinya adalah "seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama." Dalam perkembangan selanjutnya. Kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga diserap ke dalam bahasa Indonesia yang artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁸⁷

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak

⁸⁷*Ibid.*, h. 177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

A.Jazuli mengartikan bahwa permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah* ini biasanya hanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁸⁸

A.Jazuli mengupas ruang lingkup bidang *Siyasah Dusturiyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundang-undangan dalam persoalan kenegaraan.

Lebih lanjut A.Jazuli memetakan bidang *Siyasah Dusturiyah* menyangkut persoalan; 1) imamah, hak dan kewajibannya; 2) rakyat, hak dan kewajibannya; 3) bai'at, 4) waliyu al-'ahdi; 5) perwakilan; 6) ahlul halli wa al-'aqdi; 7) wuzarah dan perbandingannya. Selain itu ada yang

⁸⁸A.Dzajuli. *op.cit.* h. 47

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berepndapat bahwa bidang kajian *Siyasah Dusturiyah* meliputi: 1) Konstitusi; 2) legislasi; 3) ummah; 4) *shura* atau demokrasi.⁸⁹

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan ruang lingkup *Siyasah Dusturiyah* yaitu tentang dasar, asas yaitu undang-undang dasar suatu negara menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya.

E. Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Fiqih Siyasah

Islam memandang kedudukan perempuan dan laki-laki dalam posisi yang seimbang karena pada hakikatnya semua manusia adalah sama derajat kemanusiaannya. Tidak ada kelebihan satu dibanding yang lainnya disebabkan oleh suku, ras, golongan, agama dan jenis kelamin mereka. Menurut Islam, nilai kemuliaan manusia semata-mata hanya terletak pada ketaqwaannya.

Misi pokok Al-Qur'an diturunkan ialah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk diskriminasi dan penindasan baik yang berbasiskan etnis, budaya, politik, agama maupun gender. Meskipun Islam menjelaskan tentang persamaan kedudukan antara perempuan dengan laki-laki, namun pada kenyataannya masih sering kita dapati kondisi di mana perempuan masih belum mendapatkan hak-haknya akibat perlakuan diskriminatif yang dialaminya salah satunya yakni kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

Persamaan hak merupakan salah satu prinsip utama syari'at Islam, baik

⁸⁹Imam Amrusi Jalani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya : IAIN Press, 2011) h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkaitan dengan ibadah atau muamalah. Persamaan tersebut tidak hanya berlaku bagi umat Islam tetapi juga seluruh umat manusia karena persamaan hak bersimplikasi pada keadilan yang seringkali didengungkan Al-Quran dalam menetapkan hukum, sehingga prinsip persamaan hak dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan hukum Islam. Keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia.

Tak hanya melalui ayat Al-Qur'an, perintah untuk memuliakan perempuan juga disampaikan oleh sabda Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya yaitu :

اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

“aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita” (H.R Muslim : 3729)

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku” [HR. At Tirmidzi no: 3895 dan Ibnu Majah no: 1977 dari sahabat Ibnu ‘Abbas. Dan dishahihkan oleh Al Albani dalam AshShahihah no: 285].

(اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْرِجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ)

*“membantu memudahahkan untuk mendapatkan haknya dua orang yang lemah yaitu anak- anak dan perempuan”*⁹⁰

⁹⁰ Muhammad Shalih Al-Munajjid. Buku Soal Jawab Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wanita, sebagai karunia Allah ini memiliki hak-hak serta kedudukan yang begitu mulia. Wanita, yang terkenal dengan kelembutan, kasih sayang, serta kekuatannya, dapat menjadi partner terbaik bagi kaum laki-laki dalam suatu bingkai yang bernama “Rumah Tangga”. Keduanya saling bahu membahu dalam mewujudkan keluarga yang penuh rahmat, melahirkan, serta mendidik generasi manusia sebagai anak keturunannya.

Begitu pula dengan hak wanita. Agama, harta, kehormatan, akal, dan jiwanya juga terjamin serta dilindungi oleh syariat Islam. Wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam beribadah, wanita dilibatkan dalam musyawarah, dan hak-hak lainnya yang diatur dengan indah oleh agama Islam ini.

“Mutiaranya. Ia tersimpan dan tersembunyi jauh di dasar lautan. Terbungkus oleh dinding kerang yang amat rapat lagi dalam. Dinding kerang itulah yang membuatnya tetap indah lagi terjaga meski di laut yang banyak sekali makhluk. Serta ombak dan air asin yang dapat mengikis keindahan sang mutiara. Mengambilnya pun bukan perkara yang mudah. Orang harus benar-benar mencarinya. Jauh. Menyelam hingga ke dalam. Bahkan sangat jarang ditemui. Dan jika sudah diperoleh, mutiara memiliki harga yang sangat mahal jika dibandingkan dengan biota laut lainnya.”

Begitulah perumpamaan Islam dalam memandang wanita. Wanita, di dalam Islam, sangat dimuliakan dan dihormati kedudukannya. Islam menempatkan wanita sebagai makhluk yang harus dijaga kehormatannya, wibawanya, serta martabatnya. Semua itu oleh sebab wanita mempunyai peran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sangat strategis serta mulia dalam Islam, yakni sebagai pendidik generasi umat di masa mendatang.⁹¹

Kekerasan berbasis gender terhadap perempuan merupakan tindak kekerasan berbasis gender yang dalam penanganannya harus bertitik tolak pada nilai-nilai kemanusiaan, memuliakan sesama dan memberikan manfaat serta menghilangkan kemudharatan bagi manusia. Dalam upaya penanganan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan harus sejalan dengan tujuan hukum Islam yakni memelihara agama (*hifdz al-din*), pemeliharaan akal (*hifdz al-aql*), pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*), pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nash*), pemeliharaan harta (*hifdz al-mal wa al-'irdh*).

a. Memelihara agama (*hifdz al-din*),

Agama merupakan sesuatu yang harus dimiliki manusia agar manusia dapat terjaga keselamatannya. Dalam hal ini kekerasan berbasis gender terhadap perempuan merupakan serangan mental seorang laki-laki terhadap perempuan sebagai korban seringkali membawa dampak terganggunya integritas keutuhan mental psikologis korban sehingga secara spiritual cenderung mengalami kesulitan dalam mengekspresikan rasa syukur sehingga kemampuan untuk menjalin relasi dengan pencipta menjadi berkurang.

b. Pemeliharaan jiwa (*hifdz al-nafs*)

Memelihara manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupan merupakan kewajiban hukum Islam yang harus ditegakkan, kekerasan

⁹¹ <https://mbs.sch.id/2018/05/02/laksana-mutiara-islam-memandang-wanita/> Diakses pada 28 Juni 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

c. Pemeliharaan akal (*hifdz al-‘aql*)

terhadap martabat kemanusiaan seperti halnya perilaku kekerasan berbasis gender terhadap perempuan merupakan tindakan diskriminatif yang mengarah pada tindakan intervensi kepada pihak yang dilemahkan. Sesungguhnya dalam kehidupan laki-laki sebagai seorang imam (pemimpin) yang mempunyai kewajiban yang bersifat spiritual diantaranya dengan memberikan bimbingan, perlindungan, dan perlakuan yang baik kepada perempuan untuk selalu mentaati perintah Allah SWT dan mencontoh tauladan Rasul-Nya bukan melakukan tindakan kesewenang-wenangan atau pengekangan terhadap jiwa seseorang.

Pemeliharaan akal sangat penting bagi manusia karena dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berfikir tentang Allah, alam sekitar dan diri sendiri, seorang perempuan yang menjadi korban tindak kesewenang-wenangan seorang laki-laki didalam lingkup rumah tangga ataupun publik sering kali dikekang kebebasannya sebagai individu yang merdeka, gangguan psikologis seringkali menyebabkan seorang kehilangan kemampuan daya berfikirnya sehingga tidak bisa berfikir logis disamping itu secara spiritual mereka menjadi tidak mampu mengekspresikan emosinya.

d. Pemeliharaan keturunan (*hifdz al-nash*)

Dalam hal pemeliharaan keturunan, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga maupun publik tidak hanya tentang kekerasan yang menyerang fisik saja tetapi juga tindak kekerasan seksual dapat terjadi pada kekerasan berbasis gender terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perempuan, seperti pemerkosaan yang bisa mengakibatkan korban hamil diluar nikah, bahkan dapat terjadinya tindak aborsi.

a. Pemeliharaan harta (*hifdz al-mal wa al-'irdh*).

Dari segi pemeliharaan harta, seorang memiliki hak atas harta yang di miliknya, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang terjadi yang dapat merusak *hifdz al-mal* yaitu seperti Penelantaran ekonomi merujuk pada perilaku yang membuat perempuan bergantung secara finansial, misalnya dengan cara: Menarik dukungan finansial atau melarang korban bekerja, diambil atau diancam untuk diambil sumber penghasilannya dan hak untuk menikmati harta bersama, mengontrol uang dan kepemilikan korban merupakan tindakan yang dapat merusak *hifdz al-mal*.

F. Tinjauan Tentang Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling kejam, dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia pada hakikatnya perlindungan perempuan merupakan salah satu perwujudan hak untuk hidup, hak bebas dari perbudakan, dan sebagainya. Hak asasi ini bersifat langgeng dan menyeluruh, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membedakan asal-usul, jenis kelamin, agama, serta usia sehingga setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Norma-norma yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjunjung tinggi martabat manusia dan menjamin hak asasi manusia berkembang terus menerus, sehingga kebijakan regulasi perundang-undangan yang memberikan perlindungan kepada perempuan pun dibuat. Dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia terutama pada perempuan dari tindak kekerasan, maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru.

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 ini dibentuk UPT. PPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru yang menyelenggarakan fungsi teknis operasional bidang perlindungan perempuan dan anak, yakni:

1. Pengaduan masyarakat;
2. Penjangkauan korban;
3. Pengelolaan kasus;
4. Penampungan sementara;
5. Mediasi; dan
6. Pendampingan korban.

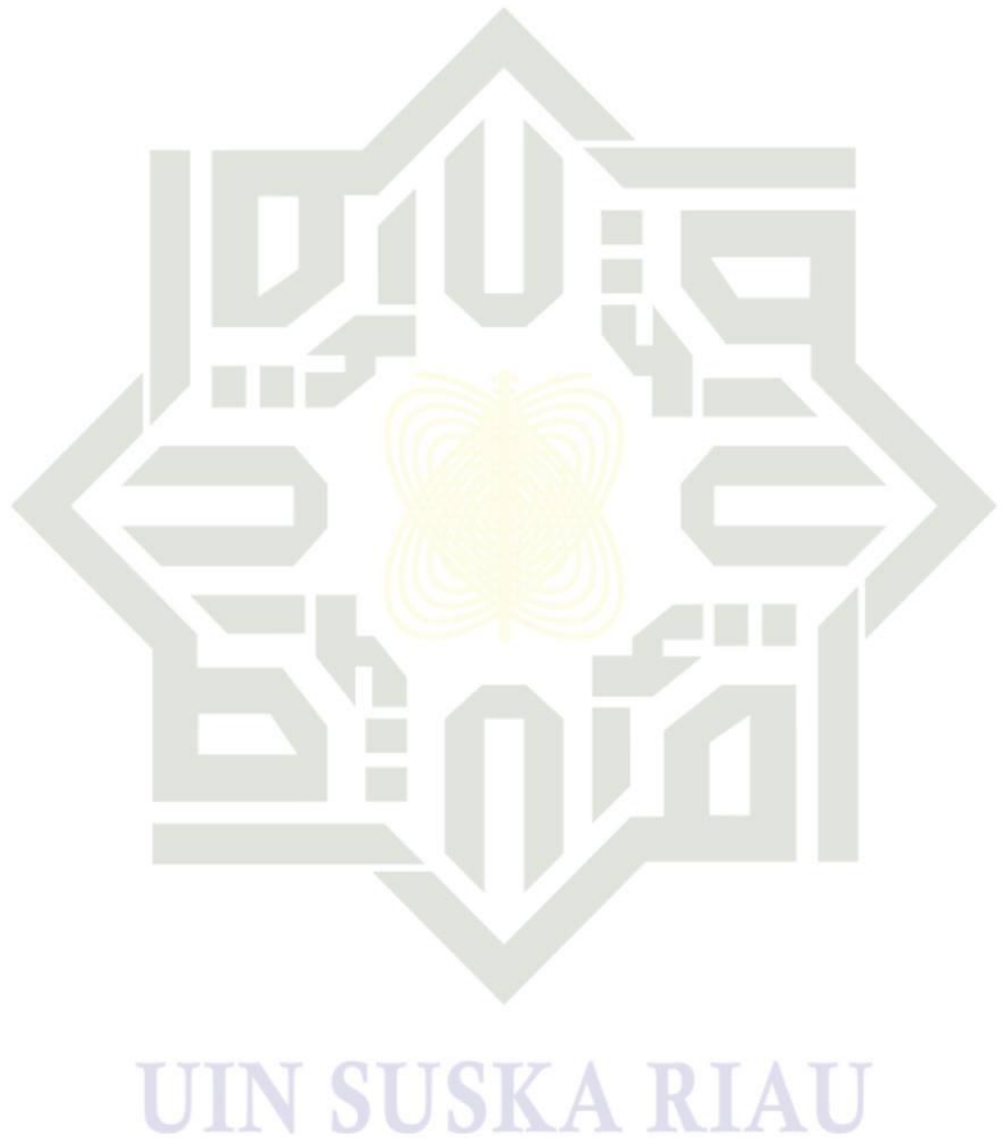
UPT PPA dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dengan adanya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru ini dapat memberikan pelayanan umum kepada masyarakat kota pekanbaru yakni pada perempuan yang mengalami tindak kekerasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh UPT PPA Kota Pekanbaru berdasarkan Perwako Nomor 142 Tahun 2019, yaitu UPT PPA Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi teknis operasional bidang perlindungan perempuan dan anak, yakni: Pengaduan masyarakat; Penjangkauan korban; Pengelolaan kasus; Penampungan sementara; Mediasi; dan Pendampingan korban. Berdasarkan hasil penelitian penulis penanganan kasus tindak kekerasan berbasis gender terhadap perempuan yang diberikan UPT PPA Kota Pekanbaru kepada masyarakat Kota Pekanbaru masih belum maksimal dikarenakan pada penanganan kasus kekerasan berbasis gender online terhadap perempuan terutama pada pengelolaan kasus, kasus hanya dapat ditangani sampai pada tahap mediasi saja karena untuk membantu menghapus rekam jejak digital korban yang sudah tersebar UPT PPA Kota Pekanbaru belum memiliki tenaga ahli IT sehingga hanya edukasi yang dapat diberikan pihak UPT PPA Kota Pekanbaru agar kejadian tersebut tidak terulang lagi di kemudian hari.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh UPT PPA Kota Pekanbaru yaitu :
 - a. Faktor Pendukung :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh UPT PPA Kota Pekanbaru yaitu UPT PPA Kota Pekanbaru memiliki fasilitas yaitu berupa layanan hotline 24 jam, mobil perlindungan, motor perlindungan, ruang tunggu, dan layanan penanganan kasus berbasis website admin e-cikpuan, akun media sosial instagram, facebook, youtube dan kami juga memiliki rumah penampungan sementara. UPT PPA Kota Pekanbaru juga bekerjasama dengan kemitraan yaitu, Kepolisian, Kejaksaan, OPD terkait, Lembaga bantuan hukum, Balai rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan Stakeholder.

- b. Faktor penghambat penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh UPT PPA Kota Pekanbaru yaitu, belum ada disediakan ruang khusus untuk mediasi, belum ada tenaga ahli IT yang dapat menghapus rekam jejak digital yang sudah tersebar, dan belum ada ruang konseling khusus perempuan,

3. Tinjauan *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah *siyasah dusturiyah*, dimana keterkaitan hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya. Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang telah ada demi melindungi rakyatnya bisa dikatakan *Maslahatul Mursalah*. Sedangkan hasil dari penelitian, pemerintah dalam hal ini UPT PPA Kota Pekanbaru belum maksimal dalam menangani masalah rakyatnya khususnya pada kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dikarenakan adanya faktor penghambat penanganan sehingga

penanganan masih belum maksimal. Berdasarkan hasil dari penelitian penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh UPT PPA Kota Pekanbaru belum sepenuhnya sejalan dengan tinjauan Fiqh Siyasah dikarenakan pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perlindungan rakyatnya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh, agar penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan oleh UPT PPA Kota Pekanbaru berjalan dengan maksimal, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Kepada Pemerintah daerah khususnya kepada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Pekanbaru untuk mencari solusi atas permasalahan yang menjadi faktor penghambat penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan agar proses penanganan menjadi lebih efektif.
2. Kepada masyarakat Kota Pekanbaru khususnya untuk perempuan agar mampu bersikap lebih tegas, dan perempuan harus berdaya terhadap segala bentuk kekerasan yang terjadi pada dirinya jangan diam jika melihat ataupun mengalami kekerasan. Dengan harapan agar tidak ada lagi terjadinya segala bentuk diskriminasi, penindasan, dan kekerasan terhadap perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alrusi Jalani, Imam. 2011. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Press
- Amri, Erman dan Prayitno. 2004. *“Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling”*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arunkunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Examedia Arkanleema
- Dzajuli, A. 2003. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* Bandung: Kencana
- Haris, Syamsudin. 2001. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta : LIPI press.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenademia Group
- Mulia, Musdah. 2014. *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Ridwan. 2006. *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto: Pusat Studi Gender)
- Saebani, Beni Ahmad Saebani. 2007. *Fiqh Siyasah*. Pustaka Setia: Bandung
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesian Press.
- Supasril. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Depok: Rajawali Pers
- Suparweni, V. Wiratna, 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustakabarupress
- Sukmadinata Nana Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Supardi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Mataram: Yayasan cerdas Pres.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarif, Mujaar Ibnu & Zada, Khamami. 2008. *Fiqh Siyashah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan

Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Indonesia, Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 142 tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

C. Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5514ad1af157a/perbedaan-peraturan-daerah-kota-dan-peraturan-walikota/> Diakses pada 6 April 2021

<https://id.safenet.or.id/wp-content/uploads/2019/11/Panduan-KBGO-v2.pdf> 06 Maret 2021

https://infeksiemerging.kemkes.go.id/download/Protokol_Penanganan_Kasus_Kekerasan_terhadap_Perpempuan_di_Masa_Pandemi_COVID-19.pdf Tanggal 06 Maret 2021

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/23#:~:text=Marjinalisasi,adalah%20dengan%20menggunakan%20asumsi%20gender> . 06 Maret 2021

D. Wawancara

Dr. Ria Dina Srikadarini, Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru, Pekanbaru, Wawancara 01 Februari 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

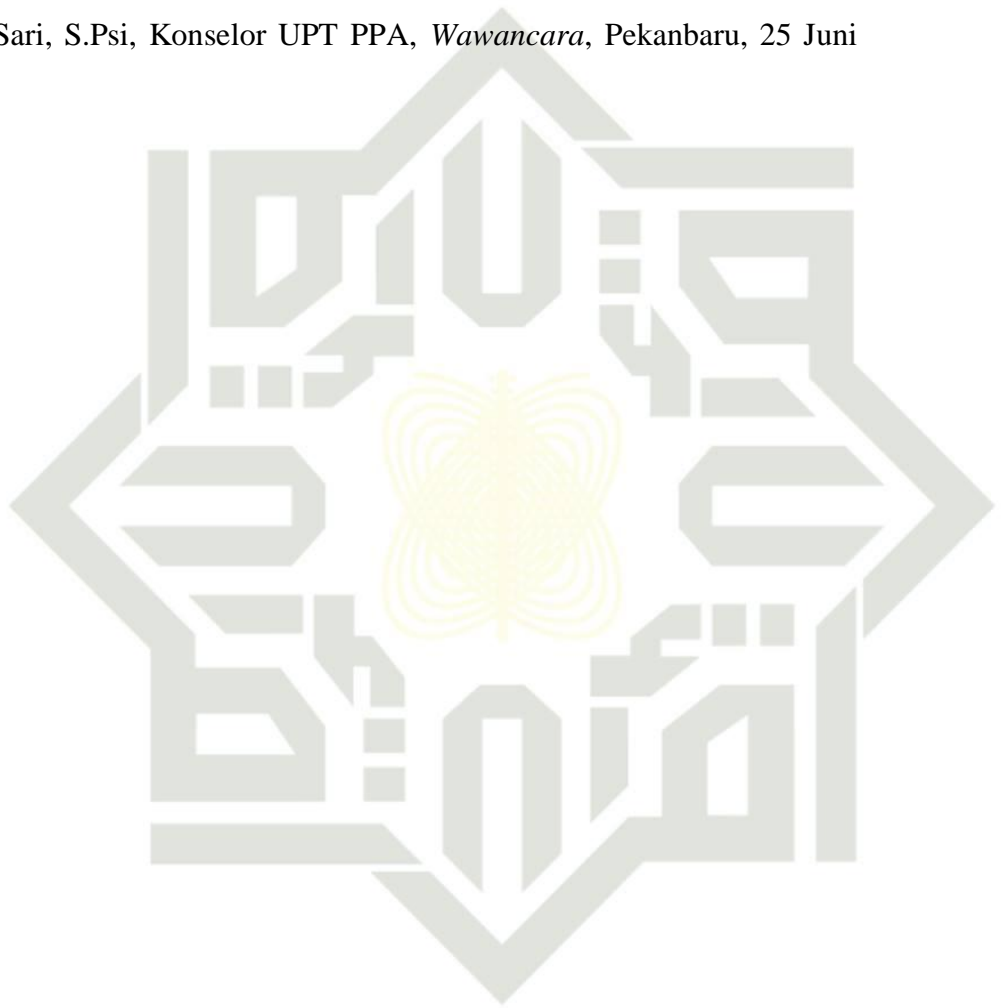
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Riska Dwi Wahyuni , S.Pd, Petugas Asesmen UPT PPA, *Wawancara*, Pekanbaru, 24 Maret 2021

Uti Amalia Situmorang, S.H, Konselor Hukum UPT PPA, *Wawancara*, Pekanbaru, 29 Maret 2021

Naufal Alwan Adilah, S.Pd, Petugas Asesmen UPT PPA, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Juni 2021

Yeni Purnama Sari, S.Psi, Konselor UPT PPA, *Wawancara*, Pekanbaru, 25 Juni 2021



UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa perbedaan kekerasan berbasis gender dengan kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana proses penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan ?
3. Sudah berapa kasus kekerasan berbasis gender yang ditangani pihak UPT PPA Kota Pekanbaru?
4. Berapa rentan usia korban kekerasan berbasis gender terhadap perempuan?
5. Apa saja fasilitas yang disediakan oleh UPT PPA Kota Pekanbaru dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan?
6. Apakah UPT PPA memiliki hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintahan lain dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan?
7. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak UPT PPA Kota Pekanbaru?
8. Apa solusi dari pihak UPT PPA Kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala tersebut?
9. Pendampingan apa saja yang diberikan konselor hukum kepada korban kekerasan berbasis gender?
10. Setelah penanganan kasus selesai korban dikembalikan ke keluarga, apakah ada mentoring kembali terhadap korban?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Ibu Dra. Ria Dina Srikadarini, Kepala UPT PPA Kota Pekanbaru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Riska Dwi Wahyuni , S.Pd, Petugas Asesmen UPT PPA



Wawancara dengan Ibu Uli Amalia Situmorang, S.H, Konselor Hukum UPT PPA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Yuli Purnama Sari, S.Psi, Konselor UPT PPA



Wawancara dengan bapak Naufal Alwan Adilah, S.Pd, Petugas Asesmen UPT PPA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **“PENANGANAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN OLEH UPT PPA KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERWAKO PEKANBARU NOMOR 142 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : **MANISHA DWI PUTRI**
NIM : **11724202856**
Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyasah)**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 Juni 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, MA

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Dr. Amrul Muzan, MA

Penguji II
Bambang Hermanto, M.AG

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

: MANISHA DWI PUTRI

: 11724202856

: HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

: PENANGANAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER
TERHADAP PEREMPUAN OLEH UPT PPA KOTA PEKANBARU
BERDASARKAN PERWAKO PEKANBARU NOMOR 142 TAHUN
2019 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pembimbing: Irfan Zulfikar, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 Juli 2021

Pimpinan Redaksi



M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un. 04/F.I.1/PP.00.9/1316/2021

Pekanbaru, 21 Januari 2021

Biasa

Mohon Izin Melakukan PraRiset

Kepada

Yth.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru

di

tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama	: MANISHA DWI PUTRI
NIM	: 11724202856
Semester/Tahun	: VII (Tujuh)/ 2021
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

ditugaskan untuk melaksanakan prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin dengan judul : PENANGANAN KASUS KEKERASAN FISIK TERHADAP PEREMPUAN OLEH UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF FIQIH SYARIAH.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

UIN SUSKA RIAU

Dekan
KEMENTERIAN AGAMA
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Fakultas Syariah dan Hukum
Dr. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19380712 198603 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 22 Februari 2021

Un 04/F.I/PP.00.9/2314/2021

Biasa

1 (Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: MANISHA DWI PUTRI
NIM	: 11724202856
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PENANGANAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN OLEH UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERWAKO PEKANBARU NO 142 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor

Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ak Cpl Diindungi Undang-Undang

© Hal ini adalah milik UIN Suska Riau

UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/39092
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/PP.00.9/2314/2021 Tanggal 22 Februari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : MANISHA DWI PUTRI |
| 2. NIM / KTP | : 11724202856 |
| 3. Program Studi | : HUKUM TATA NEGARA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PENAGANAN KASUSU KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN OLEH UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERWAKO PEKANBARU NO 142 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PEMBERDAYAAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

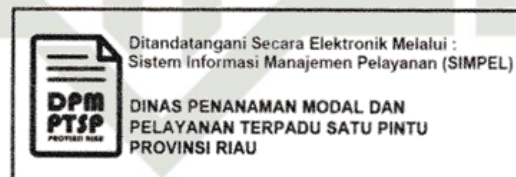
1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 Februari 2021



UIN SUSKA RIAU

Revisi :

Ditandatangani :

Ditandatangani :
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
Yang Bersangkutan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta dimiliki oleh UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/679/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/39092 tanggal 26 Februari 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

Nama : **MANISHA DWI PUTRI**
 NIM : **11724202856**
 Fakultas : **SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**
 Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **JL. JEND. A. YANI RILEK I KEL. TEMBILAHAN HULU KEC. TEMBILAHAN HULU-INDRAGIRI HILIR**
 Judul Penelitian : **PENANGANAN KASUS KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP PEREMPUAN OLEH UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERWAKO PEKANBARU NO 142 TAHUN 2019 DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**
 Lokasi Penelitian : **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKANBARU**

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 1 Maret 2021

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru

Sekretaris

H. MAISISCO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710514 199403 1 007



Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dasar : 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



MANISHA DWI PUTRI, Lahir di Tembilahan pada tanggal 08 Maret 1999. Anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan ayahanda, Ashabul Yamin dan ibu Nurmayati. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SDN 014 Pengalihan Enok, lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah Tembilahan, lulus pada tahun 2014. Setelah menyelesaikan pendidikan SMP penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Tembilahan Hulu, dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul "Penanganan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan Oleh UPT PPA Kota Pekanbaru Berdasarkan Perwako Pekanbaru No 142 Tahun 2019 Dalam Perspektif Fiqih Siyasah". Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah pada tanggal 8 Juni 2021 jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).